

# OTSUS PLUS DAN PARTISIPASI RAKYAT PAPUA

Oleh  
Tim Kajian Papua  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Seminar Akhir Tahun  
"Papua *Annual Review* 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua"

Auditorium LIPI, Lantai 2 | Kamis, 12 Desember 2013



# OTSUS PLUS DAN PARTISIPASI RAKYAT PAPUA<sup>1</sup>

Oleh:  
Tim Kajian Papua  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## Catatan Papua 2013

### 1) Otsus Plus dan Legitimasi Politik

Pada 2013 ini Gubernur Papua yang baru terpilih, Lukas Enembe, berusaha membuat langkah besar merevisi UU 21/2001 tentang Otsus menjadi Otsus Plus yang diwujudkan dalam RUU baru dengan nama RUU Pemerintahan Papua. Berbekal restu Presiden SBY pada April 2013 dan dukungan sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Enembe membentuk tim asistensi dari Universitas Cenderawasih pada Juni 2013 untuk menyempurnakan draf RUU. Untuk memperkuat dukungannya, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga dilibatkan dan turut menyempurnakannya. Tidak berhenti di sini, Enembe juga berkonsultasi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dari segi substansi, RUU Pemerintahan Papua versi Papua dan Papua Barat lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan UU 21/2001. Masalah-masalah terpenting Papua dan Papua Barat tercakup dan lebih detil di sana. Bidang pengelolaan sumber daya alam, pembatasan pendatang ke Papua, partai politik lokal, pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi, kewenangan pusat dan daerah, pendidikan dan kesehatan, pemekaran, kerjasama internasional, olah raga, dan tanah ulayat dirumuskan dengan jelas demi keuntungan sebesar-besarnya bagi penduduk asli Papua. Jika kedua versi tersebut dikombinasikan dengan cermat, RUU tersebut secara substansi bisa menjadi *road map* baru untuk penyelesaian masalah Papua.

Tetapi revisi UU Otsus masih bermasalah dari segi proses. Sejak awal, terkesan prosesnya elitis karena hanya melibatkan elit pemerintah provinsi, DPRP dan MRP. Prosesnya dianggap tertutup karena tidak mudah mendapatkan draf awalnya. Kalangan Gereja, LSM dan lembaga masyarakat sipil lainnya tidak diajak konsultasi. Belum lagi kelompok garis keras. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Papua (Gempar) bahkan berdemo menolak Otsus Plus. Intinya konsultasi publik belum dilakukan, oleh karenanya dukungan publik dan legitimasi politik belum ada. Repotnya, banyak pihak di Papua terlanjur percaya bahwa Otsus Plus adalah rekayasa Jakarta.

---

<sup>1</sup> Ringkasan Catatan Papua 2013 ini dipresentasikan dalam acara “Annual Review Papua 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan TIFA, di Jakarta, 12 Desember 2013.

Tantangan Otsus Plus terbesar justru datang dari Jakarta. Pertama, rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir. Kekuasaannya kurang efektif lagi dan konsentrasi partainya mengarah ke pemilu legislatif dan presiden 2014. Dukungan DPR RI pun belum dibangun. Kedua, terkait substansi RUU terutama menyangkut pengadilan HAM dan rekonsiliasi, partai politik lokal, serta pembatasan pendatang ke Papua, akan mengundang kecurigaan kalangan konservatif di Jakarta akan adanya agenda ‘separatis’ yang tersembunyi. Belajar dari pengalaman UU 21/2001, resistansi pasti akan muncul di sini. Konsultasi dengan Jakarta harus dilakukan secara intensif dengan dukungan penuh presiden dan berbagai parpol. Jika tidak, RUU itu akan diabaikan begitu saja.

## 2) Pemekaran dan Pemerintahan Daerah

Pada 1999 Provinsi Irian Jaya (diubah menjadi “Papua” pada 2000) hanya memiliki 9 kabupaten/kota. Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi di seluruh Indonesia, provinsi ini juga dimekarkan. Hingga 2012, Tanah Papua memiliki 2 provinsi, yaitu Papua dengan 1 kota dan 28 kabupaten, sementara Papua Barat dengan 1 kota dan 12 kabupaten. Total 42 kabupaten/kota. Pada akhir tahun ini 2013 Komisi II DPR RI menyetujui RUU tentang pemekaran 30 kabupaten dan 3 provinsi baru. Jadi, jika disetujui oleh pemerintah, di Tanah Papua akan ada 72 kabupaten/kota dengan penduduk yang hanya sekitar 3,6 juta jiwa (2010).

Pemekaran telah menghasilkan gedung-gedung baru pemerintah, rumah sakit, sekolah dan lain-lain, namun gedung-gedung baru itu sebagian besar kosong dan berfungsi sangat minimal. Para PNS mangkir dari kantor, sekolah atau puskesmasnya tanpa mendapat sanksi. Pemekaran telah menciptakan jumlah penduduk fiktif, kampung fiktif, dan mungkin juga distrik fiktif demi dana insentif, demi jumlah kursi legislatif dan jatah PNS. Selama ini, berbagai analisis menunjukkan pemekaran telah membuat kinerja pemda memburuk terutama pada pelayanan publik. Kemdagri mencatat pada 2011 bahwa Papua Barat merupakan provinsi terburuk dan tujuh dari 10 kabupaten terburuk di Papua dan Papua Barat. Pemekaran juga memperluas medan korupsi dan domestikasi sumberdaya negara dalam konflik berlapis antarklen yang rawan kekerasan.

Dengan pemekaran 72 kabupaten/kota tersebut di atas, akan dipilih sekitar 1800 anggota DPRD, 144 bupati/walikota dan wakilnya, serta akan ada 1000an pejabat di pemda serta puluhan ribu pegawai negeri baru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tanah Papua akan dihabiskan untuk membayar gaji para pejabat, PNS, fasilitas, operasional dan sisanya akan menjadi obyek korupsi. Pemekaran supercepat yang prosesnya penuh manipulasi ini dilakukan sama sekali tanpa strategi perencanaan pembangunan keseluruhan tanah Papua. Hal ini akan membawa Papua ke dalam berbagai krisis pemerintahan yang merugikan rakyat Papua kebanyakan.

## 3) Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 2013 ini, juara korupsi se-Indonesia direbut oleh Papua Barat untuk kategori provinsi dan Nduga (Provinsi Papua) untuk kategori kabupaten. Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) mencatat bahwa Kabupaten Nduga Provinsi Papua merupakan

nomor satu dari lima Kabupaten Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum se Indonesia. Kabupaten Nduga mencatat delapan kasus korupsi dengan nilai korupsi sebesar Rp 89.452.480.000. Sementara itu, Provinsi Papua Barat meraih juara satu dari lima Provinsi Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum.

Tahun 2013 juga harus dilihat sebagai tahun istimewa untuk pemberantasan korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dibandingkan dengan sebelumnya, pada 2013 ini pemerintah tidak ragu lagi memberantas korupsi di Papua berkat kerja keras Kapolda Papua Tito Karnavian yang membuat Satgas Antikorupsi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua E.S. Maruly Hutagalung yang juga membuat gebrakan mengadili semua pejabat tinggi daerah yang terlibat korupsi. Pejabat legislatif dan eksekutif yang terlibat, dari yang tertinggi hingga yang terendah diadili. Ini juga menunjukkan bahwa korupsi di kedua provinsi itu sudah merata, dari provinsi hingga kampung. Pada tahun ini, jumlah temuan kasus korupsi dan upaya penegakan hukumnya juga meningkat signifikan.

Pada Januari 2013, John Ibo yang masih menjabat Ketua DPRP (2009-2014) divonis 20 bulan penjara karena kasus proyek fiktif pembangunan rumah tinggal senilai Rp 5,2 miliar. Tidak lama setelah itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan bahwa sejumlah besar anggota DPRP tersangkut penyalahgunaan dana bantuan sosial 2012 dengan jumlah bervariasi dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uniknya, staf khusus Presiden RI Velix Wanggai juga disebut menikmatinya dengan jumlah Rp 200 juta. Kapolda berjanji akan menyidik kasus tersebut.

Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) (2009-2014) Yosef Auri pada November 2014 juga diadili karena korupsi dana pinjaman Rp 22 miliar dari BUMD PT Padoma. Selain melibatkan Sekda Provinsi Papua Barat Marthen Rumadas, korupsi ini juga dinikmati semua anggota DPRPB. Sebagian besar dana korupsi sudah dikembalikan, tetapi semua anggota DPRPB yang terlibat tetap diadili. Sulit dibayangkan, semua anggota DPRPB masuk penjara. Cerita korupsi berlanjut ke bawah. Para pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong sebagian besar juga terlibat dalam penyelewengan dana pelantikan Walikota Sorong 2012 sebesar 5,4 miliar.

Tidak hanya petinggi legislatif yang terlibat korupsi, pejabat pemerintah provinsi juga terlibat, misalnya Sekda Papua Barat Marthen Rumadas, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat Edi Sirait dan Kabid Perbendaharaan Marthen Erari. Kasus korupsi terus bermunculan dengan tersangka bupati, kepala dinas dan pejabat yang lebih rendah lainnya. Misalnya mantan Bupati Merauke John Gluba Gebze dan bawahannya. Kepala suku dan kepala kampung juga terindikasi korupsi dengan menciptakan kampung fiktif untuk mengambil dana Respek.

Korupsi juga melibatkan penegak hukum. Polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus ditangkap karena terlibat kasus bahan bakar ilegal dan pembalakan liar. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi (PPATK) menemukan transaksi selama 2007-2012 di rekening Sitorus mencapai Rp 1,5 triliun. Untuk melindungi bisnis ilegalnya, Sitorus mengaku, mengalirkan uang ke petinggi polisi lebih dari Rp 10 miliar selama 2012-2013. Rekan sesama penegak hukum, mantan Kajari Sorong Djasman Sumardi juga

menjadi terdakwa pada Pengadilan Tipikor Papua Barat untuk kasus penyalahgunaan uang hasil lelang. Djasman Sumardi diduga mencairkan uang-uang hasil lelang milik negara dalam empat tahap ke rekening pribadinya.

4) Perkembangan Gerakan Politik Sipil dan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM)

Gerakan politik sipil di perkotaan Provinsi Papua dan Papua Barat didominasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak 2009 hingga hari ini 2013. Jaringan organnya tumbuh pesat di kota-kota penting di Tanah Papua. Mereka mengusung agenda referendum untuk kemerdekaan Papua. Menurut catatan 2012 demo KNPB tidak selalu tertib dan damai. Sejumlah aksinya mengganggu lalu-lintas, menyerang pemukiman dan warga sipil, meneror wartawan dan anggota DPR Papua, hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian. Demo-demo KNPB selalu bersinergi dengan kegiatan OPM di luar negeri terutama dengan Benny Wenda yang bermarkas di Oxford.

Pada 2013, menyadari polisi yang semakin represif dan untuk mendapatkan simpati publik, KNPB terus menekankan bahwa demonya akan dilakukan dengan tertib dan damai. Meskipun mengalami represi yang lebih keras pada 2013, KNPB sepanjang 2013 telah mengadakan sekitar 10 aksi demo di berbagai kota di Papua dan Papua Barat. Pada satu sisi, KNPB menekankan aksi demo damai merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan demokrasi yang harus dihormati serta mengecam tindakan represif polisi. Pada sisi lain, KNPB juga memanfaatkan represi polisi dan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM untuk mendukung kampanye Papua Merdeka di forum internasional.

Sejak pertengahan 2012, Kelompok Bersenjata TPN/OPM telah memilih “Jenderal” Goliath Tabuni yang berbasis di Kabupaten Puncak Jaya sebagai Panglima Tertinggi TPN/OPM. Pimpinan lainnya di Timika, Biak, Paniai, dan beberapa tempat lain mengakuinya. Secara bertahap jumlah senjata yang dikuasai meningkat dan kelompok-kelompoknya membesar. TPN/OPM semakin solid dan terpimpin. Selain itu, kelompok hutan ini juga semakin bersinergi dengan KNPB yang lebih terpelajar dengan pengetahuan politik yang lebih luas. Pihak Polri/TNI belum berhasil menangkap dan mengungkap kelompok di hutan ini. Potensi gangguan keamanannya semakin besar. Semakin sulit memberantas kelompok bersenjata ini dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian mereka belum akan mampu melumpuhkan pemerintah setempat.

Pada 2013 kelompok bersenjata TPN/OPM kurang agresif dibandingkan pada 2012. Kelompok Puncak Jaya mencatat enam peristiwa kekerasan yang mematikan. Jumlah total 27 korban. Korban TNI 9 tewas dan 2 luka, warga sipil 4 tewas dan 10 luka. Sementara 2 anggota TPN/OPM tewas. Pada satu peristiwa penyerangan oleh TPN/OPM, tujuh anggota TNI tewas sekaligus. Tidak seperti biasa, TNI tidak melakukan operasi pembalasan mungkin dikhawatirkan akan ada ekses pelanggaran HAM. TNI memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut ke polisi.

## 5) Kelompok OPM Mancanegara

Pada 2013 ini *Free West Papua Campaign* (FWPC) yang dipimpin oleh Benny Wenda di Oxford sukses menarik perhatian dunia internasional dan merepotkan Pemerintah Indonesia. Pertama, pada 28 April 2013 Benny Wenda, meresmikan pembukaan kantor FWPC di Oxford yang dihadiri oleh Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi dan beberapa tokoh terkenal di Inggris. Pemerintah Indonesia bereaksi keras, Menlu Marty Natalegawa langsung menegur dan meminta klarifikasi Duta Besar Inggris untuk RI. Kedua, pada 1 Desember 2013 Benny Wenda berhasil membuka kantor perwakilan FWPC di Port Moresby Papua Nugini (PNG) yang dihadiri oleh Gubernur Port Moresby Parkop. Lebih heboh lagi, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera PNG di depan kantor pemerintah. Perdana Menteri (PM) PNG yang sudah bersahabat dengan Pemerintah Indonesia berusaha mencegah kejadian ini, tetapi gagal.

Pada 2013 ini, faksi-faksi Papua Merdeka yang berbasis di Vanuatu dan Australia, yakni *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) yang dipimpin oleh John Ondowame juga berhasil mendapatkan dukungan dari Melanesian Spearhead Group (MSG). Meskipun keputusan tentang keanggotaan WPNCL di dalam MSG ditunda, sebagai *state parties* Negara Vanuatu dan Solomon Islands, memercayai adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Keberhasilan ini membuat Pemerintah Indonesia bekerja keras, misalnya, melobi pemimpin MSG untuk menunda keanggotaan WPNCL, mengirim Menkopolkam ke Fiji dan mengundang PM PNG ke Jakarta untuk kerjasama ekonomi.

Kritik internasional terhadap pemerintah Indonesia dan simpati kepada masyarakat Papua atas kemacetan pelaksanaan Otsus dan masalah pelanggaran HAM terutama atas buruknya jaminan kebebasan berekspresi bagi warga Papua semakin meningkat. Sorotan kritis dan berbagai keprihatinan dari berbagai lembaga non-pemerintah, seperti Amnesty Internasional, *Human Rights Watch*, *Asia Human Rights Watch*, dan lain-lain telah menjadi fakta rutin. Yang baru pada 2013 adalah meningkatnya penilaian kritis berbagai perwakilan pemerintah di forum *Universal Periodic Review*, debat di Parlemen Inggris serta dukungan resmi dan terbuka negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG terhadap perjuangan kemerdekaan Papua.

Faksi-faksi OPM di berbagai negara (Australia, Vanuatu, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat) semakin sinergis dalam meningkatkan kampanye Papua Merdeka di fora internasional. FWPC di Oxford berkoordinasi secara disiplin dengan KNPB di Indonesia dan mendukung kegiatan di luar negeri dengan berbagai demo di Papua dan di daerah Indonesia lainnya. Sebelumnya, perjuangan mereka hanya mendapat dukungan dari kalangan LSM, universitas dan sedikit dari kalangan parlemen, namun pada 2013 ini dukungan terbuka dan resmi juga berasal dari pejabat pemerintah dan institusi negara secara resmi. Sebagai suatu gerakan dengan sumber daya yang sangat kecil, pencapaian kelompok-kelompok tersebut sangat signifikan.

## 6) Upaya Memulai Dialog

Jaringan Damai Papua (JDP) yang terbentuk dari kalangan masyarakat sipil di Papua dan di Jakarta telah aktif sejak 2010 untuk menjadi fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dengan berbagai kelompok, termasuk yang berseberangan dengan pemerintah, di Papua maupun di luar negeri. JDP berkampanye dan mengadvokasi pendekatan dialog bagi penyelesaian konflik Papua. JDP bekerja membangun fondasi proses yang damai dan bermartabat agar penyelesaian konflik di Papua dapat dimulai dan hasilnya memiliki legitimasi, dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik terutama pemimpin Papua dan pemerintah.

Di Tanah Papua, di Jakarta dan di luar negeri berbagai konsultasi, diskusi, pertemuan pribadi dengan kelompok masyarakat sipil telah dibuat untuk membangun konstituensi dan jaringan yang aktif untuk mendukung dialog. Kampanye dilakukan melalui media massa, media sosial hingga penerbitan berbagai buku. Sampai 2013 dukungan telah terbangun dari pimpinan tradisional Papua, LSM lokal, gereja, mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional. Di luar negeri kelompok semacamnya yang peduli dengan HAM dan keadilan di Papua juga menunjukkan dukungannya. Kalangan faksi-faksi politik moderat pro-merdeka telah melihat kemungkinan positif dari proses ini.

JDP juga membangun komunikasi dengan pribadi dan lembaga kunci pemerintah agar gagasan tentang pendekatan dialog menjadi salah satu pilihan. Pada awal 2013, komunikasi dan sejumlah pertemuan eksploratif untuk mencari titik temu antarpara pihak yang berkonflik telah dilakukan. Tujuan utamanya membangun *trust* dengan memberikan ruang dan kesempatan untuk berbicara, saling mendengar dan berdiskusi secara terbuka dan setara. Pertemuan eksploratif juga bertujuan untuk membangun *common ground* dalam rangka membangun Papua yang damai, baik di bidang politik, keamanan, sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Pada penghujung 2013 ini berbagai perkembangan gerakan politik sipil di Papua, kelompok sipil bersenjata, hingga perkembangan internasionalisasi konflik Papua yang semakin rumit serta pemilu legislatif dan presiden 2014 yang akan segera datang, membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menanggapi masalah Papua. Langkah advokasi seperti tertahan untuk sementara. Untuk mengurangi kesenjangan komunikasi yang berakibat pada terus menurun saling percaya antara pemerintahan dan masyarakat Papua, LIPI bekerjasama dengan JDP, akan terus berupaya dengan memfasilitasi pertemuan eksploratif.

## 7) Kebijakan Pemerintah

Pemerintah meyakini bahwa esensi masalah Papua terletak dalam kesejahteraan. Jika berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, diyakini, aspirasi Papua Merdeka akan pudar. Oleh karena itu pemerintah mengerahkan sumberdaya sepenuhnya untuk “percepatan pembangunan”, program-program berkategori *quick wins*, dan proyek-proyek afirmasi yang bernilai politik tinggi. Wujud kesungguhan itu terlihat terutama dari

fantastisnya jumlah dana Otsus (hampir Rp 40 triliun hingga 2013) dan dana lain dari pusat untuk Papua dan Papua Barat. Pembentukan UP4B dan terobosan koordinasi pembangunan sosial ekonominya juga menegaskan visi pemerintah tersebut.

Terkait kebebasan berekspresi, Pemerintah berpendirian bahwa unjuk rasa yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, meskipun dilakukan secara damai dan tertib, dikategorikan sebagai tindakan makar menurut Pasal 106, 110 dan 116 KUHP. Di Tanah Papua Kapolda Tito Karnavian juga menggunakan UU 9/1998 dan UU Darurat No 12/1951. Kapolda menegaskan, demo yang mengangkat isu kemerdekaan Papua dilarang karena tidak mendukung keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan ini diyakini sejalan dengan visi pemerintah untuk memberantas separatisme dan menjaga keutuhan NKRI di Papua. Demo semacam ini tidak dilihat oleh Pemerintah sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Menghadapi gerakan politik sipil, pada 2013 ini polisi lebih represif dan tidak pernah menerbitkan STTP bagi demo yang dianggap separatis. Pasukan dalam jumlah besar, kadang-kadang digabung dengan TNI AD, disiapkan untuk mengendalikan demo. Polisi mencegah pengerahan massa dalam jumlah besar, bahkan menjaga titik kumpul semalam sebelumnya, membubarkan yang sudah bergabung, menangkap dan menginterogasi para aktivisnya dan mengadili pimpinannya. Hanya beberapa demo bisa berlangsung tertib tanpa dibubarkan. Polisi juga menggerebek acara ‘doa bersama’ yang diadakan oleh kelompok yang dianggap separatis.

Sepanjang 2013, polisi telah menangkap/menginterogasi lebih dari 500 orang. Pada 2012 jumlah tapol/napol sudah sekitar 26 orang, pada 2013 polisi menghasilkan setidaknya 49 tapol/napol baru. Hampir dua kali lipat, total menjadi 75 orang. Dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, tuduhan penganiayaan, penyiksaan di kantor polisi atau bahkan pembunuhan aktivis muncul. Semua tuduhan pelanggaran HAM ini belum bisa dibuktikan karena tidak ada institusi yang melakukan penyelidikan secara imparial. Semua informasi dimonopoli oleh polisi. Tuduhan aktivis dan pegiat HAM diabaikan oleh negara.

Menghadapi kelompok bersenjata TPN/OPM yang beberapa kali melakukan serangan, berhasil menewaskan prajurit TNI dan merebut senjatanya, Pemerintah tidak meningkatkan operasinya atau mengembangkan strategi baru untuk melumpuhkan mereka. Pada 2013 ini pemerintah menilai gerakan politik sipil di perkotaan Papua dan Papua Barat serta jaringannya dengan OPM di manca negara jauh lebih berbahaya dan memerlukan penanganan khusus. Itu sebabnya Polda Papua bereaksi jauh lebih serius terhadap aksi demo KNPB daripada aksi penembakan yang dilakukan sesekali di Puncak Jaya.

Menyadari pendekatan keamanan yang tidak efektif, sejak akhir 2010 hingga awal 2012, Presiden SBY pernah mengawali pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua. Pada akhir 2010 SBY menunjuk Farid Husein untuk penjajagan dengan TPN/OPM dan pemimpin politik lainnya. Pada akhir 2011 dan awal 2012, Presiden SBY secara terbuka



menyatakan siap untuk berdialog dengan pemimpin masyarakat Papua. Sayangnya, kecurigaan masih sangat besar terhadap pemimpin Papua. Pada 2013 ini lingkaran kekuasaan di sekitar SBY meyakini ada agenda referendum dan “internasionalisasi” Papua di balik agenda pendukung dialog. Elit di lingkaran SBY tidak bisa membedakan kelompok garis keras yang menuntut referendum dan kelompok moderat yang mendukung dialog. Akibatnya, percobaan SBY itu secara diam-diam dibuat mandeg.

## **Kesimpulan**

Pada 2013 Pemerintah menghadapi tantangan politik separatisme yang semakin kompleks di Tanah Papua maupun eksternalisasi isu Papua di luar negeri. Pendekatan kesejahteraan yang disinergikan dengan pendekatan keamanan belum menunjukkan hasil dan cenderung gagal. Situasi politik dan keamanan Papua semakin buruk ditandai dengan semakin represif dan tertutupnya pemerintah. Situasi HAM juga memburuk ditandai dengan berlipatnya jumlah tapol/napol.

Di tengah situasi konflik, rendahnya kepercayaan di antara berbagai pemangku strategis, serta oportunistik politik di Jakarta dan di Papua telah menyuburkan praktik pemekaran yang manipulatif, pemilukada yang carut-marut dan korup. Praktik pemekaran dan pemilukada yang ada telah menjerumuskan pemerintahan daerah ke dalam krisis pemerintahan, krisis pelayanan publik, dan hak-hak rakyat Papua untuk memperoleh kesejahteraan terabaikan.

Pada 2013 ini pula muncul pertama kali upaya berani penyelesaian masalah Papua oleh Gubernur Papua Lukas Enembe melalui ide Otsus Plus yang hendak merevisi UU Otsus yang sedang berlaku. Substansi RUU yang ditawarkan menjawab secara komprehensif masalah mendasar di Papua namun masih diperlukan proses partisipasi luas rakyat Papua dan dukungan Jakarta untuk menyukseskannya menjadi bagian dari solusi Papua.

Pengalaman JDP membuat konsultasi publik dan membangun dukungan berbagai pihak di Papua dan di Jakarta dapat dijadikan pelajaran. Lukas Enembe akan berhasil melahirkan Otsus Plus jika pendekatan dialog yang berintegritas dan bermartabat diadopsi. Sebagus apa pun substansi Otsus Plus atau gagasan penyelesaian Papua lainnya, tidak akan berhasil apabila prosesnya tidak melibatkan berbagai pihak terutama yang berlawanan, sehingga hasilnya akan memperoleh legitimasi dari semua pihak.